

PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN UNTUK PENGUATAN INDUSTRI PARAWISATA DI PANGANDARAN

Agus Setiaman¹, Raden Fachry Nurakhman², dan Azizul Rahman³

^{1,3}Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

²Mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran

E-mail: ¹ agus.setiaman@unpad.ac.id; ²raden24020@mail.unpad.ac.id; ³azizul.rahan@unpad.ac.id

ABSTRAK. Poklahsar dapat memainkan peran penting dalam mendukung sektor industry pariwisata di Pangandaran melalui penyediaan produk kuliner khas Pangandaran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Produk seperti kerupuk ikan, jambal roti, abon ikan, hingga terasi khas Pangandaran merupakan ikon yang memperkuat daya tarik sebuah destinasi wisata. Keberadaan produk lokal yang unik merupakan elemen penting dalam pariwisata berbasis komunitas karena mampu memperkuat identitas daerah sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi secara langsung ke masyarakat lokal. Keberhasilan Poklahsar dapat dijadikan model replikasi bagi wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Tak kalah penting, perlu dibangun pola kemitraan strategis antara Poklahsar dan pelaku industri pariwisata, seperti hotel, restoran, pusat oleh-oleh, serta biro perjalanan. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas distribusi produk Poklahsar, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor ekonomi lokal dan sektor pariwisata secara langsung.

Kata Kunci: Industri Parawisata; Pemberdayaan; Kolaborasi; Kemitraan; pengalaman wisata.

EMPOWERING FISHERY PROCESSING AND MARKETING GROUPS TO STRENGTHEN THE TOURISM INDUSTRY IN PANGANDARAN

ABSTRACT. Poklahsar can play a crucial role in supporting the tourism industry in Pangandaran by providing unique culinary products that are an integral part of the tourist experience. Products such as fish crackers, jambal roti (roti), fish floss, and Pangandaran's signature shrimp paste (shrimp paste) are iconic and enhance the attractiveness of a destination. The presence of unique local products is a crucial element of community-based tourism, strengthening regional identity while simultaneously distributing economic benefits directly to the local community. The success of the Poklahsar (Community Development Group) can serve as a model for replication in other coastal areas in Indonesia. Equally important, strategic partnerships need to be established between Poklahsar and tourism industry players, such as hotels, restaurants, souvenir shops, and travel agencies. This collaboration will not only expand the distribution of Poklahsar products but also strengthen the link between the local economy and the tourism sector directly.

Keywords: Tourism Industry; Empowerment; Collaboration; Partnership; tourism experience.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat yang menawarkan pesona bahari yang khas. Pantainya yang memikat, kekayaan laut yang melimpah, serta keberagaman budaya lokal menjadikan daerah ini menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, daya tarik Pangandaran tidak semata berasal dari alamnya, melainkan juga dari kehidupan komunitas lokal yang turut andil dalam membangun daya saing pariwisata daerah (Muftiadi, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah semakin menitikberatkan pembangunan sektor pariwisata melalui pendekatan berbasis ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Model pembangunan semacam ini dipercaya lebih berkelanjutan karena menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam

mengelola potensi daerah (Ratnawati & Nasehudin, 2019).

Salah satu aktor lokal yang berperan signifikan adalah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, atau Poklahsar. Melalui kegiatan mengolah hasil laut menjadi produk siap konsumsi, Poklahsar tidak hanya memperkuat ekonomi rumah tangga anggotanya, tapi juga memperkaya pengalaman kuliner wisatawan yang datang ke Pangandaran (Herlambang, 2023). Dari produk seperti ikan asin, abon, terasi, hingga kerupuk khas, kelompok ini mengangkat cita rasa lokal sebagai bagian dari identitas wisata.

Poklahsar sendiri muncul dari inisiatif warga pesisir yang ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya laut. Struktur organisasinya yang bersifat kekeluargaan menjadikan komunikasi kelompok sebagai elemen kunci dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hal inilah yang membuat Poklahsar

menarik dikaji dari perspektif komunikasi kelompok dan pemberdayaan masyarakat (Leilani et al., 2020).

Di tengah arus globalisasi dan percepatan digital, Poklahsar juga dihadapkan pada tantangan adaptasi teknologi. Tidak semua anggotanya memiliki latar belakang pendidikan dan akses yang cukup terhadap teknologi digital. Meski begitu, pelatihan dan pendampingan dari berbagai pihak mulai mendorong mereka untuk bertransformasi secara digital, baik dalam proses produksi maupun pemasaran (Hartati et al., 2021).

Poklahsar telah mempresentasikan entitas sosial yang bekerja melalui interaksi, koordinasi, dan proses pengambilan keputusan secara kolektif. Melalui dinamika komunikasi kelompok yang terbangun, mereka menjalankan fungsi-fungsi organisasi seperti perencanaan produksi, pembagian tugas, promosi produk, hingga resolusi konflik. Untuk memahami dinamika tersebut, beberapa teori komunikasi kelompok yang relevan dapat digunakan sebagai landasan analisis.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas peran Poklahsar dalam ekosistem pariwisata Pangandaran, kajian ini menjadi penting untuk menggambarkan kontribusi mereka secara lebih sistematis. Terlebih lagi, tantangan yang dihadapi kelompok ini semakin besar dengan adanya perubahan sosial, teknologi, dan pasar yang menuntut adaptasi serta penguatan kapasitas kelompok.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Poklahsar di Pangandaran adalah ketergantungan tinggi pada musim tangkap ikan. Kegiatan produksi mereka sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku laut, yang fluktuatif mengikuti kondisi cuaca dan musim. Ketika musim paceklik tiba, hasil tangkapan menurun drastis, menyebabkan proses produksi terganggu atau bahkan terhenti. Dampaknya langsung terasa pada penghasilan anggota kelompok, yang jadi tidak menentu (Herlambang, 2023). Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga psikologis, karena ketidakpastian penghasilan memicu kecemasan dan menurunkan motivasi anggota kelompok untuk berinovasi.

1. Rendahnya Literasi Digital dan Terbatasnya Akses Pasar

Kemajuan teknologi digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun di sisi lain, anggota Poklahsar masih menghadapi hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan

platform digital. Banyak dari mereka belum terbiasa menggunakan media sosial atau marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan. Akibatnya, penjualan produk masih bergantung pada cara-cara tradisional seperti menitip di toko oleh-oleh atau menjual langsung ke pelanggan lokal (Hartati et al., 2021).

Kendala ini diperparah oleh infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti jaringan internet yang lemah dan keterbatasan perangkat elektronik. Kurangnya pelatihan dan bimbingan juga membuat transformasi digital sulit dilakukan. Padahal, jika dimaksimalkan, teknologi digital dapat menjadi pintu masuk menuju pasar yang lebih luas, bahkan hingga luar negeri.

2. Terbatasnya Infrastruktur dan Modal Usaha

Aspek infrastruktur menjadi tantangan berikutnya. Banyak Poklahsar belum memiliki tempat produksi yang layak, baik dari sisi kebersihan, penyimpanan, maupun pengemasan. Proses produksi masih mengandalkan peralatan sederhana yang kurang efisien, sehingga hasil akhirnya tidak selalu mampu bersaing dengan produk dari sektor industri yang lebih mapan.

Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan usaha. Sebagian besar anggota tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal karena terkendala persyaratan administratif atau tidak punya jaminan. Akibatnya, mereka bergantung pada modal pribadi yang terbatas, sehingga sulit melakukan ekspansi atau inovasi.

3. Kurangnya Kolaborasi Antarpihak

Meski berpotensi besar, keterlibatan Poklahsar dalam ekosistem pariwisata Pangandaran belum maksimal. Produk-produk mereka jarang ditemukan di pusat oleh-oleh resmi, hotel, atau restoran mitra pariwisata. Pemerintah dan lembaga pariwisata juga belum sepenuhnya memosisikan Poklahsar sebagai mitra strategis dalam pembangunan wisata daerah.

Akibatnya, produk-produk Poklahsar kurang mendapat tempat di ruang-ruang publik wisata, seperti pusat oleh-oleh, hotel, atau restoran. Rostini et al. (2023) menyatakan bahwa tanpa kolaborasi dan perencanaan lintas sektor yang matang, kontribusi Poklahsar terhadap pembangunan daerah akan tetap marginal dan tidak berdampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Masalah ini juga menunjukkan belum terlaksananya fungsi-fungsi komunikasi strategis antar kelompok dan pemangku kepentingan secara maksimal, sebagaimana dijelaskan dalam

Teori Fungsional. Kegagalan dalam membangun komunikasi lintas sektoral menghambat upaya integrasi dan kolaborasi yang seharusnya dapat memperluas jangkauan dan kontribusi Poklahsar dalam ekosistem pariwisata.

4. Minimnya Regenerasi dan Aspek Kelembagaan

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya partisipasi generasi muda. Saat ini, sebagian besar anggota Poklahsar adalah perempuan di atas usia 40 tahun. Sementara kaum muda cenderung melihat kegiatan mengolah hasil laut sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan dan kurang menarik.

Di sisi kelembagaan, masih banyak kelompok yang belum memiliki struktur organisasi yang jelas dan belum terdaftar secara hukum. Tanpa legalitas, mereka kesulitan mengakses bantuan, mengikuti pelatihan formal, atau menjalin kerja sama dengan mitra usaha yang lebih besar. Masalah ini menghambat tumbuhnya profesionalisme dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

Masalah ini juga dapat dianalisis melalui Teori Kontingensi, yang menggarisbawahi bahwa struktur dan efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepemimpinan dan lingkungan internal kelompok (Fiedler, 1967). Dalam hal ini, struktur kelembagaan Poklahsar perlu diperkuat agar mampu menjawab tantangan regenerasi dan akuntabilitas organisasi dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka dibutuhkan intervensi yang komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri. Strategi pemberdayaan harus dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan agar Poklahsar dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Pangandaran.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada penulis dalam memahami realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan kontekstual, khususnya

berkaitan dengan kehidupan kelompok masyarakat seperti Poklahsar. Dalam pendekatan ini, penulis tidak hanya menggambarkan fakta yang tampak secara kasat mata, tetapi juga berusaha mengeksplorasi makna di balik aktivitas kelompok, relasi antaranggota, serta kontribusi mereka terhadap pariwisata daerah secara lebih mendalam.

Jenis penulisan ini relevan digunakan untuk mengevaluasi proses komunikasi kelompok, strategi pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebab, pendekatan kualitatif deskriptif memusatkan perhatian pada pemahaman mendalam naratif yang utuh, serta koneksi antarfenomena yang seringkali tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kualitatif yang cenderung generalis. Dengan kata lain, metode ini menjadi alat analisis yang kuat untuk menjelaskan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat pesisir Pangandaran.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode studi pustaka (*library/research*). Studi pustaka merupakan teknik sistematis yang dilakukan untuk menghimpun informasi dan data melalui dokumen tertulis yang relevan. Penulis mengakses berbagai literatur berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi, laporan hasil penelitian, artikel akademik, dokumen kebijakan daerah, serta publikasi dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang membahas isu-isu terkait Poklahsar, komunikasi kelompok, pemberdayaan komunitas, dan pariwisata berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

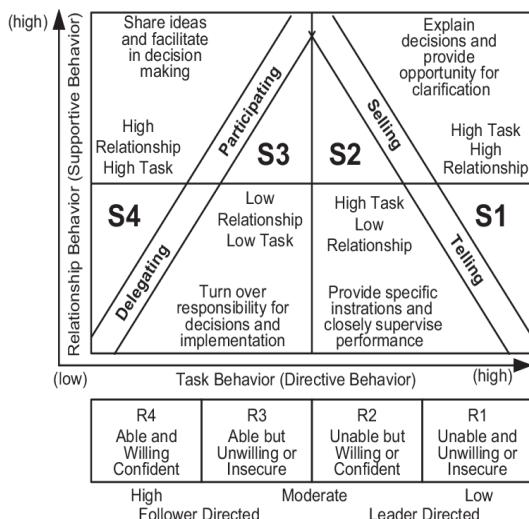
Poklahsar sebagai organisasi masyarakat pesisir menjalankan aktivitasnya melalui interaksi kelompok kecil yang intens. Oleh karena itu, kerangka komunikasi kelompok menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan, koordinasi kerja, pembagian peran, serta penyelesaian konflik dilakukan. Salah satu teori utama yang digunakan dalam menganalisis dinamika ini adalah *Functional Theory of Group Decision Making* yang dikembangkan oleh Hirokawa (1998). Teori ini menekankan bahwa kelompok akan mencapai keputusan efektif jika melalui empat tahap penting: analisis masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, dan evaluasi pilihan.



Sumber: Ruangguru.com

Gambar 1. Model Keseimbangan Functional Theory Of Group Decision Making

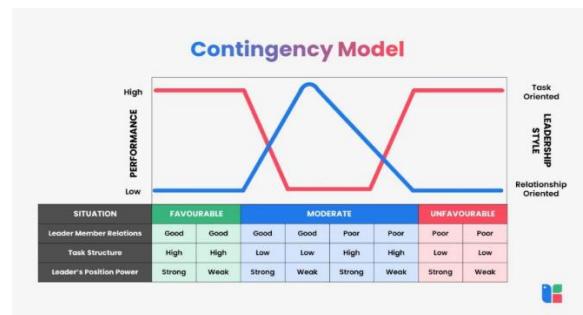
Dalam praktiknya sendiri, Poklahsar juga menghadapi dinamika kepemimpinan yang beragam. Oleh karena itu, teori lain yang relevan adalah *Situational Leadership Theory* yang dikemukakan oleh Hersey et al., (1969). Teori ini menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan seorang pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kesiapan dan karakteristik anggota kelompok. Dalam konteks Poklahsar, di mana anggotanya berasal dari latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam, pemimpin yang fleksibel dan responsif akan lebih efektif dalam menggerakkan anggota untuk berinovasi dan bekerja sama.



Sumber: ResearchGate

Gambar 2. Model Situational Leadership Theory

Selain itu, *Contingency Theory* dari Fiedler (1967) juga digunakan untuk memahami bagaimana efektivitas organisasi dan kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya individu, tetapi juga oleh kecocokan antara gaya tersebut dengan konteks sosial dan lingkungan. Dalam konteks Poklahsar, hal seperti ketergantungan musiman, fluktuasi bahan baku olahan, serta tekanan pasar menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kepemimpinan sebuah kelompok.



Sumber: BusinessToYou

Gambar 3. Model Contingency Theory

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Industri Parawisata Pangandaran

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari pendekatan pembangunan berkelanjutan. Poklahsar sebagai kelompok usaha mikro berperan tidak hanya dalam peningkatan pendapatan anggota, tetapi juga dalam pelestarian kearifan lokal dan identitas budaya. Hartati et al. (2021) menyoroti pentingnya pendampingan terhadap pelaku UMKM perempuan di wilayah pesisir untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi digital. Hal ini sejalan dengan peran strategis Poklahsar yang mayoritas anggotanya adalah perempuan.

Leilani et al. (2020) menjelaskan bahwa komunitas berbasis lokal cenderung memiliki mekanisme komunikasi internal yang kuat yang berbasis kekeluargaan. Mekanisme ini mendukung terbentuknya solidaritas sosial dan memperkuat identitas kolektif sebagai komunitas penggerak ekonomi lokal.

Prameswari et al. (2024) juga menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif. Dalam konteks Poklahsar, potensi sinergi ini belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur, pelatihan, dan pasar yang kompetitif.

Poklahsar memainkan peran penting dalam mendukung sektor pariwisata melalui penyediaan produk kuliner khas Pangandaran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Produk seperti kerupuk ikan, jambal roti, abon ikan, hingga terasi khas Pangandaran merupakan ikon yang memperkuat daya tarik sebuah destinasi wisata. Muftiadi (2017) menunjukkan bahwa keberadaan produk lokal yang unik merupakan elemen penting dalam pariwisata berbasis komunitas karena mampu memperkuat identitas daerah sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi secara langsung ke masyarakat lokal.

Ratnawati & Nasehudin (2019) menjelaskan bahwa penguatan peran kelompok lokal seperti Poklahsar juga berdampak pada

keberlanjutan pariwisata. Kelompok ini tidak hanya bertanggung jawab dalam produksi, tetapi juga dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan pesisir yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa terdapat banyak tantangan struktural yang dihadapi Poklahsar. Rostini et al. (2023) mencatat bahwa minimnya regulasi, lemahnya dukungan kelembagaan, serta keterbatasan promosi digital menyebabkan kontribusi Poklahsar terhadap sektor pariwisata belum optimal.

2. Poklahsar Sebagai Agen Transformasi Sosial dan Ekonomi Pangandaran

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir Pangandaran. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaku usaha mikro, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi. Dalam proses produksi, Poklahsar mengolah hasil laut seperti ikan menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual yang tinggi, seperti kerupuk iknn, jambal roti, abon ikan, dan lain-lain. Produk-produk ini telah menjadi bagian penting dalam industri wisata kuliner Pangandaran.

Menurut Hartati et al. (2021), kelompok perempuan di wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam usaha pengolahan hasil laut. Poklahsar telah membuktikan hal ini dengan memberdayakan anggota-anggotanya, mayoritas perempuan usia produktif hingga lanjut usia, dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan posisi sosial mereka di masyarakat.

Dalam pandangan teori komunikasi kelompok, Poklahsar mencerminkan kekuatan komunikasi internal yang bersifat kohesif. Seperti yang dijelaskan oleh Leilani et al. (2020), pola komunikasi yang terbangun melalui nilai kekeluargaan dan musyarakah menjadi landasan terciptanya kerjasama yang kuat di antara anggota. Komunikasi ini memungkinkan proses produksi berjalan lebih efisien dan menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap sebuah kelompok.

Lebih jauh lagi, Muftiadi (2017) menjelaskan bahwa Poklahsar telah menjadi ele-men penting dalam memperkuat citra destinasi wisata Pangandaran. Produk-produk khas yang dihasilkan oleh Poklahsar bukan hanya menjadi oleh-oleh, tetapi juga mencerminkan sebuah identitas

budaya lokal. Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi kelompok dalam menjaga kualitas produk, merespon kebutuhan pasar, dan membangun hubungan yang baik dengan para konsumen.



Gambar 4. Pengenalan Poklahsar Pangandaran

Kontribusi Poklahsar dalam mendorong transformasi sosial juga terlihat dari bagaimana kelompok ini menjadi contoh praktik pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan gender. Dalam masyarakat pesisir Pangandaran yang sebagian besar masih memegang nilai-nilai patriarki, eksistensi Poklahsar memperlihatkan bagaimana perempuan bisa mengambil peran strategis dalam ekonomi rumah tangga dan komunitas secara lebih luas. Ini menjadikan Poklahsar sebagai model organisasi komunitas yang bukan hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga progresif secara sosial.

Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan utama. (Hartati et al., 2021) menyoroti bahwa masih banyak anggota Poklahsar yang belum memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan distribusi produk. Padahal, potensi pasar sangat besar, terutama di era pariwisata digital saat ini. Kurangnya pelatihan dan pendampingan digital menyebabkan produk Poklahsar kalah bersaing dengan produk modern lainnya.

Rendahnya akses terhadap modal usaha juga menjadi hambatan serius dalam pengembangan kelompok. Banyak anggota Poklahsar yang belum memiliki jaminan atau legalitas usaha yang cukup untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal. Akibatnya, mereka hanya mengandalkan modal pribadi yang terbatas, yang pada gilirannya membatasi kapasitas produksi dan inovasi produk. Keterbatasan ini juga menyulitkan kelompok untuk memenuhi permintaan dalam skala besar saat musim liburan atau ketika terjadi lonjakan wisatawan.

Banyak Poklahsar belum memiliki struktur organisasi yang jelas, tidak terdaftar secara hukum, serta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Rostini et al., 2023).

Tanpa legalitas ini, akses mereka terhadap bantuan pemerintah, pelatihan, maupun program kerja sama dengan sektor swasta menjadi sangat terbatas. Prameswari et al. (2024) menyarankan agar reformasi kelembagaan dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi dari pihak pemerintah dan akademisi.

Reformasi kelembagaan bukan hanya penting untuk aspek administrasi, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar Poklahsar dalam jejaring pariwisata. Dengan legalitas yang kuat, Poklahsar dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan pelaku industri pariwisata lainnya, seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan lainnya. Hal ini memungkinkan produk-produk Poklahsar masuk dalam rantai pasok pariwisata dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

3. Urgensi Regenerasi dan Inovasi Strategi Komunikasi

Regenerasi anggota menjadi tantangan tersendiri dalam keberlangsungan Poklahsar. Saat ini, sebagian besar anggota kelompok merupakan perempuan berusia di atas 40 tahun, sedangkan partisipasi generasi muda masih sangat minim. Minimnya regenerasi ini beresiko terhadap keberlanjutan kelompok dalam jangka panjang, terutama dari segi inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta dinamika pasar pariwisata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dikembangkan strategi komunikasi kelompok yang lebih inklusif dan inovatif. Penggunaan pendekatan intergenerasional, pelatihan berbasis digital, serta promosi Poklahsar sebagai bagian dari industri kreatif bisa menjadi cara untuk menarik minat generasi muda. Komunikasi yang dibangun harus berbasis pada nilai kebersamaan namun terbuka terhadap perubahan dan kreativitas.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

- Poklahsar merupakan contoh nyata dari sinergi antara potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi kelompok yang efektif. Dengan memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan membuka ruang regenerasi serta inovasi digital, kelompok ini memiliki peluang besar untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.
- Keberhasilan Poklahsar menjadi bukti bahwa pembangunan daerah yang partisipatif dapat

diwujudkan melalui penguatan komunitas. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang adaptif, dan dukungan kelembagaan menjadi elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar Poklahsar dan kelompok serupa dapat berkembang lebih optimal dalam mendukung pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran-Saran

- Pemerintah kabupaten perlu meningkatkan dukungan kelembagaan kepada Poklahsar melalui program pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi legalitas usaha. Pemberian akses terhadap bantuan permodalan, infrastruktur produksi, dan promosi digital perlu ditingkatkan agar kelompok ini dapat berkembang lebih optimal dan bersaing dalam pasar wisata yang kompetitif.
- Untuk Poklahsar sendiri perlu terus mengembangkan kapasitas anggotanya, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun komunikasi digital. Pelatihan mengenai pengelolaan usaha, inovasi produk, dan pemasaran berbasis media sosial menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Fiedler, F. E. (1967). *A Theory of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill, New York. *Open Access Library Journal*, 8(9).

Hartati, S., Budi Mulyono, N., Ridwan Zaelani, M., Shayed Alam, N., Lufhti Zulfiqor, M., of Business, S., Technologi Bandung, I., Arsitektur, S., dan pengembangan Kebijakan, P., Teknologi Bandung, I., & Tinggi Imu Ekonomi Gema, S. (2021). Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online Melalui Media Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Dan Upaya Keberlanjutan Usaha. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 2021). http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snp_pm

Herlambang. (2023). Strategi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Dalam Peningkatan Ekonomi Kelompok Pengolah Dan Pemasar (Poklahsar) Di Kabupaten Pangandaran. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan*

Kewirausahaan, 1(5), 73–83. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v1i5.170>

Hersey, P., Blanchard, K., & Johnson, D. (1969). *Management of Organizational Behavior*.

Hirokawa, R. Y. (1998). Group Communication and Decision-Making Performance: A Continued Test of the Functional Perspective. *Human Communication Research*, 14(4), 487–515. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1988.tb00165.x>

Leilani, A., Nurfitriana, N., & Kasmawijaya, A. (2020). Strategi Komunikasi dalam Penerapan Teknologi Usaha Perikanan di Pesisir Selatan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 14(3), 283–299. <https://doi.org/10.33378/jppik.v14i3.214>

Muftiadi, A. (2017). Developing Tourism Village And Its Potential In Pangandaran District. In *Jurnal AdBispreneur* (Vol. 2, Issue 2).

Prameswari, M. Z., Munir, S., & Endah, K. (2024). Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Otonomi*, 1(2), 215–228.

Ratnawati, E., & Nasehudin. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Memberdayakan Ekonomi Kreatif Masyarakat. In *Jurnal Edueksos: Vol. VIII* (Issue 1).

Rostini, I., Intan Pratama, R., & Evi Liviawaty, dan. (2023). *Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Pangandaran*.